



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN RKPD**

**2024**

**PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jl. Kapten Muslihat No. 21, RT. 001/RW. 001, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor 16122  
Tlp. (0251) 8338052, website:[www.bappeda.kotabogor.go.id](http://www.bappeda.kotabogor.go.id)



**PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**  
**BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (P2EPD)**

Nomor SOP	: SOP/P2EPD.1/014
Lintas Fungsi Peta Proses Bisnis	: Melaksanakan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Aktivitas Lintas Fungsi	: Melaksanakan Penyusunan RKPD
Tgl. Pembuatan	: 03 Januari 2024
Tgl. Revisi	:
Tgl. Efektif	: 03 Januari 2024
Disahkan oleh	: <p align="center">Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kota Bogor</p>  <p align="center">Sury Mashudi, S.T., M.P. NIP. 197707062006041018</p>
Judul SOP	: <b>PELAKSANAAN RKPD</b>

**DASAR HUKUM**

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</li> <li>4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</li> <li>5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor</li> <li>6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor</li> <li>2. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK )</li> </ol>
--	--

**KETERKAITAN**

**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penanganan Surat Masuk</li> <li>2. SOP Penanganan Surat Keluar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/ Laptop</li> <li>2. Printer</li> <li>4. ATK</li> </ol>
---	---

**PERINGATAN**

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat pelaksanaan RKPD tidak terlaksana	
---	--

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket	
		Fungsional Perencana	Kepala Badan	Sekretaris Daerah	Walikota	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1	Rancangan perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala bappeda kepada kepala daerah (walikota) melalui sekretaris daerah untuk persetujuan penetapan dan perundangan					Draf Rancangan RKPD	15 Menit	Permintaan Persetujuan Rancangan RKPD ke Walikota	
2	Rancangan perkada disampaikan paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan perkada tentang RKPD					Draf Rancangan RKPD	1 Hari	Persetujuan Rancangan RKPD	
3	Walikota menetapkan peraturan walikota tentang RKPD kota paling lambat 1 minggu setelah RKPD provinsi ditetapkan					Persetujuan Rancangan RKPD	1 Hari	Menerbitkan Peraturan Walikota Tentang Pelaksanaan Rancangan RKP	
4	RKPD yang telah ditetapkan dijadikan sebagai : pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja perangkat daerah kota dan pedoman penyusunan rancangan APPD kota serta rancangan prioritas dan platfon anggaran sementara kota					Menerbitkan Peraturan Walikota Tentang Pelaksanaan Rancangan RKPD	1 Hari	Publikasi Peraturan Walikota dan Arsip	